



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERKEMBANGAN
PARIWISATA DI KAWASAN SENGGIGI KABUPATEN LOMBOK
BARAT**

*Collaborative Governance in Tourism Development in The Senggigi Area, West
Lombok Regency*

Ahmad Fitra Baiti Rahman¹, Amil², Ilham Zitri³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: hellooytras@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing collaborative governance in the development of tourism in the Senggigi area of West Lombok regency. The development of a tourist spot with optimal resource management can be shown through the synergy that is built between various stakeholders, both government, private and community. In addition, as a material consideration in making tourism potential development decisions, it is important to know how the collaboration that has been built and what factors encourage and inhibit collaboration in developing a tourism object. The method that researchers use is a descriptive qualitative method. This method was chosen because it is suitable for accurately describing individual characteristics, symptoms, circumstances and situations of certain groups. This study uses data collection methods through various forms such as observation, interviews, and documentation. This study uses collaborative governance theory from DeSave which provides 7 (seven) indicators as analytical tools. The research results show that collaborative governance in tourism development in the Senggigi area as a whole has not shown maximum results. This can be seen from: a weak network structure, marked by the absence of related actors. Commitment to goals (not good), seen from the absence of common goals and common missions created. Level of trust (weak), where strong trust is only built between collaborative actors between government agencies. Access to power (good enough), where the Tourism Office is very open and knows the performance of other collaborating actors. Division of accountability (good enough), where each collaborative actor has their own duties. Information sharing (not optimal), where the information is mostly shared only with those who are members of government agencies. Access to resources (not yet maximized), this is evidenced by infrastructure development that is still inadequate, even though the development of quality human resources can be said to be already under way.

Keywords: *collaborative governance; development; tourism, Senggigi*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui collaborative governance dalam perkembangan pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Pengembangan suatu tempat wisata dengan pengelolaan sumber daya secara optimal dapat ditunjukkan melalui sinergi yang dibangun antar berbagai stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengembangan potensi wisata, maka penting untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang telah dibangun dan faktor apa saja mendorong dan menghambat kolaborasi dari sebuah pengembangan objek wisata.

Metode yang peneliti gunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini dipilih sebab sesuai untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala,

keadaan dan situasi kelompok tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan datanya melalui berbagai bentuk seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari DeSave yang memberikan 7 (tujuh) indikator sebagai alat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dilihat dari: struktur jaringan yang lemah, ditandai dengan belum terlibatnya aktor-aktor terkait. Komitmen terhadap tujuan (belum baik), terlihat dari tidak adanya tujuan bersama dan misi umum yang diciptakan. Tingkat kepercayaan (lemah), dimana kepercayaan yang kuat hanya dibangun antar aktor kolaborasi antar instansi pemerintah. Akses terhadap kekuasaan (cukup baik), dimana Dinas Pariwisata sangat terbuka dan mengetahui kinerja dari aktor kolaborasi lainnya. Pembagian akuntabilitas (cukup baik), dimana setiap aktor kolaborasi sudah memiliki tugas masing-masing. Berbagi informasi (belum optimal), dimana informasi tersebut lebih banyak dibagikan hanya kepada mereka yang tergabung dalam instansi pemerintah. Akses terhadap sumberdaya (belum maksimal), hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang masih belum memadai, meskipun pembangunan kualitas SDM dapat dikatakan sudah berjalan.

Kata Kunci: *collaborative governance; pengembangan; pariwisata, Senggigi*

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang perlu dikembangkan, hal ini sesuai pernyataan “pariwisata bisa menjadi alat pengembangan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan produksi lainnya dan sektor penyedia jasa” (Aeni & Astuti, 2019). Selain itu, sektor pariwisata juga diyakini mampu mendorong perekonomian baik secara global maupun lokal di mana dapat meningkatkan devisa, pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat setempat (Soebagyo, 2018). Manfaat sektor pariwisata ini menunjukkan bahwa pariwisata memang menduduki posisi yang strategis untuk pembangunan suatu negara bahkan daerah. Oleh karenanya, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan menyeluruh sangat dibutuhkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan adanya kerjasama dan kemitraan antar berbagai pihak atau stakeholder, misalnya antara pemerintah, swasta, dan masyarakat maupun pihak-pihak lain yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata.

Suryahudaya (2020) menjelaskan bahwa suatu kebijakan (termasuk kebijakan di sektor pariwisata) dapat berjalan efektif apabila dilakukan kolaborasi, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri, menurutnya, menggandeng pihak swasta seperti UMKM dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rachmahyanti, n.d.). Konsep kolaborasi ini selanjutnya dikenal dengan istilah *collaborative governance* (Faidati & Muthmainah, 2018). Berbicara mengenai kolaborasi multisektor, sangat tepat jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata, sebab untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya oleh salah satu pihak, melainkan juga butuh kerjasama dari multipihak (Hermansyah, dkk., 2020).

Lombok merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki beragam keindahan, mulai dari keindahan alam hingga keindahan budaya. Belakangan ini, Lombok menjadi salah satu daerah wisata yang banyak digandrungi oleh wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini terlihat dari angka kunjungan yang mencapai 400.595 wisatawan di tahun 2020 meningkat menjadi 839.215 wisatawan di tahun 2021 (Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2021).

Peningkatan jumlah kunjungan menunjukkan adanya keseriusan dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Lombok. Keseriusan ini juga terlihat dari beragam penghargaan yang diperoleh oleh Lombok dari sektor pariwisata, misalnya pada tahun 2016 Lombok memenangi empat kategori kompetisi Wisata Halal Nasional 2016; (1) kategori Resort Ramah Wisatawan Muslim Terbaik (Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok Tengah, NTB). (2) Website Travel Ramah Wisatawan Muslim Terbaik (Wonderful Lombok Sumbawa: www.wonderful LombokSumbawa.com. NTB) (3) Destinasi Bulan Madu Wisatawan Muslim Terbaik (Kawasan Lembah Sembalun Lombok Timur, NTB). (4) Kuliner Khas Terbaik (Ayam Taliwang Moerad, NTB) (Arifin, 2017).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 1989 tanggal 15 Agustus 1989 telah menetapkan 15 kawasan potensial untuk dikembangkan. Terdapat 9 kawasan di Pulau Lombok dan 6 kawasan di Pulau Sumbawa. Salah satu Kawasan pariwisata yang potensial untuk dikembangkan di Pulau Lombok adalah Kawasan Senggigi. Pada tahun 2013, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028. Dalam peraturan daerah tersebut disebutkan tentang adanya Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (K a n o m, 2015).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan pariwisata dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031. Dalam Bab V tentang Rencana Pola Ruang Wilayah, Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya, Pasal 26 disebutkan bahwa kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf g diarahkan pada: *pertama*, kawasan wisata alam (salah satu kawasan yang direncanakan adalah kawasan Pantai Senggigi dan sekitarnya). *Kedua*, kawasan wisata budaya. *Ketiga*, kawasan wisata buatan direncanakan pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. *Keempat*, pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (Hariady, 2018).

Merujuk pada peraturan daerah tentang tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat di atas, maka kawasan Senggigi termasuk dalam wilayah pengembangan wisata alam. Bahkan kawasan wisata Senggigi memberi sumbangan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat. Dari PAD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 yang berjumlah 140 milyar, 50-60 %

disumbang dari bidang pariwisata, khususnya kawasan Senggigi, Narmada, dan Sekotong (bisnis.com, 2014).

Kawasan Senggigi merupakan salah satu tujuan wisata terbesar yang ada di Lombok Barat. Kawasan ini menjadi salah satu wisata favorit wisatawan dan paling sering dikunjungi. Memiliki potensi alam dengan pantai yang indah, dan memiliki pasir putih, membuat jumlah wisatawan yang datang cukup tinggi. Keindahan pantai tersebut kerap kali membuat pantai ini menjadi salah satu pantai terindah di Lombok (Mahottama Sakti et al., 2015). Dengan keberagaman potensi yang dimiliki oleh kawasan Senggigi dan agar dapat mengembangkan Kawasan Senggigi menjadi wisata yang berkelanjutan, maka diperlukan sebuah strategi pengembangan yang kolaboratif.

Pengembangan suatu tempat wisata dengan pengelolaan sumber daya secara optimal dapat ditunjukkan melalui sinergi yang dibangun antar berbagai stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki suatu tempat wisata, maka penting untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang telah dibangun dan faktor apa saja mendorong dan menghambat kolaborasi dari sebuah pengembangan objek wisata. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata kawasan Senggigi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mendorong dan menghambat *collaborative governance* pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi. Dengan demikian, maka penelitian ini berjudul “*Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat*”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk meneliti suatu fenomena dan gejala sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya. Dengan metode penelitian ini diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data (Anggito, 2018).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu atau untuk menetapkan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dalam masyarakat (Siyoto dan Sodik, 2015).

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu: (1) sumber data primer yang diperoleh dari data-data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian, dan (2) sumber data sekunder dalam hal ini berupa data sumber lain atau catatan-catatan dari lapangan berupa dokumen-dokumen.

Teknik penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini didasarkan pada teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus

yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2016). Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari tiga elemen, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada 3 tehnik yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan studi dokumnetasi. Sementara proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan konsep operasional yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun konsep operasional yang digunakan melihat *collaborative governance* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat mengacu pada teori DeSeve (2009) tentang delapan indikator keberhasilan *collaborative governance*, yaitu; struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan, akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya.

1. Struktur Jaringan

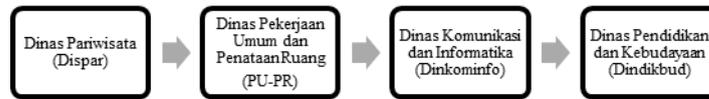
Untuk melihat struktur jaringan yang dibangun dalam pengembangan pariwisata Kawasan Senggigi, akan dilihat dari sisi kolaborasi antar para pemangku kepentingan yang terlibat dan sinergitas yang dibangun antar para pemangku kepentingan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pengembangan pariwisata Kawasan Senggigi melibatkan beberapa pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat), maka untuk melihat struktur jaringan dalam kolaborasi tersebut akan dibahas dari hubungan kolaborasi antar pemerintah dan pemerintah, kolaborasi pemerintah dengan swasta dan kolaborasi pemerintah dengan kelompok masyarakat.

Pertama, Kolaborasi Pemerintah dengan Pemerintah. Dinas Pariwisata (DISPAR) Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu instansi pemeritahan di tingkat pemerintah kabupaten yang melaksanakan perannya sebagai *policy creator* yakni mewakili Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai *policy creator*/pembuat kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat juga berperan sebagai koordinator yakni aktor yang berperan dalam mengkoordinasikan antar aktor serta menjadi penghubung antar aktor yang ada dalam pengembangan pariwisata Kawasan Senggigi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam melakukan pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat telah membangun kerjasama atau kemitraan dengan beberapa instansi perangkat daerah lainnya. Masing-masing instansi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Kolaborasi Pemerintah dengan Pemerintah



Sumber: Diolah oleh Penulis

Adapun peranan dari instansi tersebut, yaitu: *pertama*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) berperan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang ada di Kawasan Senggigi. Infrastruktur tersebut dapat berupa jalanan yang baik atau tidak rusak, jembatan yang dapat menampilkan keindahan Senggigi dan dapat mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung di Kawasan Senggigi tersebut. *Kedua*, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) juga berperan dalam membantu meningkatkan jumlah kunjung yang datang ke Kawasan Senggigi. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan menggalakkan promosi pariwisata Kawasan Senggigi baik melalui media elektronik (seperti sosial media dan website) maupun melalui media non-elektronik. Ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga turut berperan dalam meningkatkan kunjungan di Kawasan Senggigi, yakni dengan membuat kebijakan rekreasi untuk sekolah, dimana rekreasi tersebut dapat dilakukan di Kawasan Senggigi.

Jalannya kolaborasi tersebut didasari oleh kesepemahaman bersama tanpa adanya perjanjian atau MoU antar instansi yang terlibat. Kesepemahaman yang dibangun tersebut adalah kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, temuan ini mempertegas bahwa suatu struktur jaringan kolaborasi terbentuk ketika orang-orang menyadari bahwa mereka perlu bersama-sama untuk secara aktif bekerja mencapai misi yang luas dan umum (Agranoff & McGuire 1997; Keast, Mandell, Brown & Woolcock, 2004).

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, penulis selanjutnya memberikan beberapa hasil analisis yang berkaitan kolaborasi yang dilakukan antar pemerintah dalam melakukan pengembangan Kawasan Wisata Senggigi. Kolaborasi tersebut, menurut hemat peneliti belum sepenuhnya melibatkan instansi yang sebenarnya juga dapat terlibat dalam pengembangan pariwisata. Misalnya, Dinas Ketenagakerjaan yang sebenarnya juga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada di Kawasan Senggigi, juga Dinas Perindustrian UMKM yang dapat berperan dalam memberikan pendampingan mengenai pendapatan ekonomi kreatif lokal dan pembentukan sikap masyarakat selaku pengelola pariwisata. Disamping itu, peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (terutama akademisi) juga perlu diperluas, tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan pariwisata, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan melalui berbagai kegiatan pengabdian dan pendampingan kepada masyarakat dibidang pariwisata yang dilakukan oleh

perguruan tinggi maupun universitas.

Kedua, Kolaborasi Pemerintah dan Swasta. Pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Pariwisata) pada dasarnya telah mengatur pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang terdiri dari pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata. Organisasi ini sebagai mitra pemerintah dan wadah komunikasi dan konsultasi para anggota dalam penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di daerah.

Kaitannya dengan pengembangan Pariwisata Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat, telah dibentuk beberapa asosiasi profesi ataupun usaha pariwisata, anatra lain: Senggigi Hotels Association (SHA), *Travel Agent Association* (Astindo) NTB, dan *Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia* (PHRI) NTB. Selain itu, asosiasi lain yang saat ini juga mulai berkembang di Lombok, termasuk di Kawasan Senggigi adalah Organisasi General Manager Hotel (IHGMA), Asosiasi Hotel Kecil, dan Casa Grande (Asosiasi Hotel Berbintang).

Penulis selanjutnya memberikan analisis bahwa peran Senggigi Hotels Association (AHA) dalam pengembangan Pariwisata Senggigi secara keseluruhan belum terlihat, karena masing-masing usaha atau industri pariwisata di Kawasan Senggigi masih berjalan sendiri-sendiri. Asosiasi sebagai wadah belum termanfaatkan secara optimal, padahal potensi asosiasi ini sangat besar. Apalagi jika asosiasi ini bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, politik pengembangan industri sangat dipengaruhi oleh kekuatan yang melekat pada para pengusaha besar, sementara industri pariwisata skala kecil seperti hotel-hotel kecil, masih perlu terus di dorong, dibina dan dikembangkan. Disinilah peran pemerintah sangat diharapkan untuk dapat membina dan mengembangkan usaha-usaha kecil ini.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dan pihak swasta masih bersifat sukarela, bahkan tugas dan fungsi dari pihak swasta masih belum melibatkan pemerintah secara penuh. Hal ini kemudian sesuai dengan yang dikatakan Agranoff & Mc Guire (dalam Chang, 2009) bahwa *collaborative governance* memberi penekanan pada kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal. Sehingga kolaborasi yang terbentuk antar pemerintah dan swasta dilandasi hubungan horizontal dan sukarela. Dengan demikian, maka perlu dibentuk kolaborasi pihak swasta dan pemerintah terutama dalam memberikan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha kecil di Kawasan Senggigi, dimana kolaborasi tersebut dapat terikat dalam suatu perjanjian kerjasama agar lebih mengikat.

Ketiga, Kolaborasi Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwasanya dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Senggigi, masyarakat yang ikut andil dalam pengembangan Kawasan Senggigi dilandasi atas keinginan dan kesadaran secara mandiri, bukan atas

dasar ajakan langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Dengan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam pengembangan pariwisata, maka dibentuklah Pokdarwis, yang mana tugas dan fungsi dari Podarwis ini adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan pengetahuan dan wawasan para anggota pokdarwis dalam bidang kepariwisataan, (2) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya, (3) mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya, (4) mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona, dan (5) mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat (Hasil wawancara bersama Ketua Pokdarwis Senteluk, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Pokdarwis di Kawasan Senggigi adalah kolaborasi dalam bentuk tidak langsung, dimana masyarakat hanya dijadikan peran “pembantu” dalam pengembangan Kawasan Senggigi. Padahal, kebijakan pengembangan akan jauh lebih baik dan berhasil apabila masyarakat justru dilibatkan secara langsung, baik dalam prose pengambilan keputusan, hingga prose implementasi maupun evaluasi kebijakan pengembangan kawasan. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan akan memahami lebih pasti mengenai apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan kawasan Senggigi, mengingat mereka adalah orang yang tinggal dan bersentuhan langsung dengan segala aktivitas di Kawasan Senggigi tersebut. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, akan menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk melakukan pengembangan di Kawasan Senggigi, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar kawasan. Seperti yang dijelaskan Doberstein (2015) bahwa alasan dibalik kolaborasi adalah untuk menghasilkan keputusan yang sama dilihat dari perbedaan para pemangku kepentingan yang terlibat. Namun, yang menjadi kelemahan dalam kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan Kawasan Senggigi tersebut adalah belum melibatkan secara utuh masyarakat dan pihak swasta dalam kolaborasi.

2. Komitmen terhadap Tujuan

Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lainnya mengacu pada beberapa tujuan pengembangan pariwisata. Sebagaimana yang dijelaskan Sudarmo (2011) bahwa komitmen terhadap tujuan mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan kolaborasi harus ada. Alasan utama tersebut adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Adapun tujuan-tujuan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Lombok Barat (termasuk Kawasan Senggigi) adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, (2) meningkatkan citra kawasan pariwisata lombok barat sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan kunjungan wisatawan nusantara, (3) melestarikan budaya daerah, lingkungan dan sumber daya pariwisata, dan (4) mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelolapariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diketahui bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, pihak swasta maupun masyarakat pada dasarnya telah memiliki berkomitmen masing-masing dalam pengembangan wisata Kawasan Senggigi. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dalam menjalankan komitmennya melakukan pengembangan disetiap tahunnya, baik dengan membangun infrastruktur maupun dengan mengadakan event-event. Sementara masyarakat yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Senggigi juga turut berkomitmen dalam kolaborasi yang dilakukan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, dengan menaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pariwisata maupun pemerintah setempat. Selain itu, pihak swasta juga turut berkomitmen terhadap tujuan pengembangan dengan memberikan berbagai diskon perhotelan, hingga turut melaksanakan event-event yang dapat menambah jumlah pengunjung.

Meskipun komitmen dari masing-masing instansi telah terbentuk, akan tetapi komitmen tersebut tidak tertuang secara tertulis dalam sebuah kesepakatan dan tujuan bersama. Padahal, Wahyudi (2018) mengungkapkan bahwa komitmen terhadap tujuan merupakan hubungan antara individu yang memberikan sesuatu dalam mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dibangun belum menghasilkan tujuan bersama bagi pengembangan Kawasan Pariwisata Senggigi.

Belum adanya komitmen untuk menghasilkan sebuah tujuan bersama dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi dapat dipandang sebagai perwujudan rendahnya efektivitas kolaborasi. Hasil penelitian bahkan menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun hanya sebatas koordinasi yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah. Sayangnya, kesepemahaman hanya diberikan bagi mereka yang tergabung dalam aktor pemerintah, namun tidak diberikan bagi aktor yang berada di luar pemerintah (swasta dan masyarakat).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada tujuan bersama dan misi umum yang diciptakan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan pariwisata Kawasan Senggigi. Hal ini jelas bertolak belakang dengan pandangan Ansell & Gash (2008) yang menilai perlunya misi umum, visi bersama dan arah yang jelas dan strategis dari pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif. Dengan demikian, kolaborasi yang dibentuk dalam pengembangan pariwisata Kawasan Senggigi masih sebatas

hubungan koordinasi yang melaksanakan tugas dari masing-masing instansi, bukan melaksanakan tujuan dari hasil kesepakatan bersama.

3. Kepercayaan

Dalam kolaborasi perlu adanya rasa percaya antara pihak yang terlibat didalamnya. Rasa percaya adalah penilaian mengenai diri sendiri mengenai bakat dan kondisi yang dicapai serta suatu keadaan yakin terhadap diri sendiri dan apa yang sedang dilakukan (Rifki, 2008). Rasa percaya dalam suatu kolaborasi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dengan adanya rasa percaya antara pihak yang terlibat maka dalam mencapai suatu tujuan tidak ada rasa saling curiga antara kedua pihak. Tujuan dari rasa percaya antara kedua pihak adalah adanya keseriusan dalam menjalankan kerjasama yang sedang dijalani.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwasanya masih terdapat rasa ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan Vangen dan Huxham (2003) yang meletakkan kepercayaan dan rasa hormat adalah bagian terpenting jika kolaborasi ingin sukses dan menyenangkan. Rasa saling percaya yang kuat hanya dibangun pada instansi yang dibentuk oleh Pemerintah. Sementara itu, instansi lain di luar instansi pemerintah masih ada rasa ketidakpercayaan dalam berkolaborasi. Hal itu didasari akibat kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego sektoral dari masing-masing pihak. Kepercayaan dari masing-masing pemangku kepentingan sangatlah diperlukan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Kawasan Senggigi, sehingga perlu dibangun rasa percaya dan komunikasi apabila terdapat permasalahan yang muncul di kemudian.

4. Akses terhadap Kekuasaan

Dalam kerjasama yang dilakukan beberapa pihak pasti terdapat pihak yang berkuasa didalamnya. Pada pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi, terdapat pihak yang berkuasa yang memimpin kerjasama yang sedang dilakukan. Dimana pihak yang berkuasa ini memiliki akses untuk mengetahui pengembangan yang sedang dilakukan, yang mana juga sering disebut dengan otoritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Adanya akses terhadap otoritas ditujukan untuk mengetahui tindakan yang sedang dilakukan dan untuk memantau pelaksanaannya. Sementara menurut Zailani (2016) akses terhadap otoritas berhubungan dengan pembagian tugas dan kewajiban yang diberikan pihak yang berkuasa kepada pihak yang bekerjasama.

Analisis menunjukkan bahwa pembagian tugas yang dilakukan berasal dari pihak yang paling tinggi yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang memberikan tugas kepada instansi pemerintah lainnya untuk membantu pengembangan Kawasan Senggigi. Selain itu, Dinas Pariwisata selanjutnya juga memberikan tugas kepada ketua pengelola untuk berkoordinasi dengan petugas

lain yang terlibat. Selain itu, pihak swasta diberikan tugas dalam hal menyiapkan berbagai akomodasi maupun paket wisata yang sesuai agar menarik jumlah pengunjung. Pembagian tugas tersebut dilakukan dengan baik karena beruntun dari pihak yang tertinggi lalu ke pihak yang ada dibawahnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat sebagai otoritas dalam memantau kinerja yang dilakukan dengan cara adanya monitoring ke pihak yang diberi amanah untuk mengelola. Dengan begitu pihak Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Barat memiliki akses yang terbuka dalam mengetahui pengembangan yang sedang dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa akses terhadap otoritas atau yang berkuasa sangat terbuka dimana Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dapat mengetahui kinerja yang sedang dilakukan dengan cara monitoring yang dilakukan. Pembagian tugas juga diberikan dari pihak tertinggi ke pihak terendah (*top-down*). Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat sebagai yang diberi tugas untuk mengembangkan pariwisata Kawasan Senggigi juga memberikan tugas kepada pengelola dan pihak swasta dengan baik, karena Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat lebih mengetahui secara rinci yang diperlukan dalam pengembangannya.

5. Pembagian Akuntabilitas

Kolaborasi memerlukan adanya pembagian tanggung jawab pada setiap pihak yang terlibat. Pembagian tanggung jawab ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mark Boven (2009) mengatakan bahwa adanya kewajiban yang telah ditentukan harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja diakhir sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adanya kewajiban yang harus dilakukan bertujuan agar pihak yang berkolaborasi memiliki kewajiban untuk memenuhi target yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata Kawasan Senggigi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan berbagai instansi lainnya dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sementara itu keterlibatan dari swasta dan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis yang ikut serta membantu dalam proses pengembangan pariwisata juga telah memiliki peranannya tersendiri.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya pembagian tugas tersebut bukanlah hasil dari kesepakatan bersama dari setiap pemangku kepentingan. Pembagian tugas tersebut merupakan pembagian tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui sebuah surat keputusan dan aturan di atasnya. Surat keputusan yang diterbitkan tersebut merupakan surat keputusan yang menetapkan siapa saja instansi yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Pariwisata, di dalamnya juga terdapat pembagian tugas dari setiap pemangku kepentingan yang dinyatakan terlibat tersebut. Sementara itu untuk pemangku

kepentingan lainnya seperti pihak swasta juga telah memiliki tanggung jawab tersendiri dari peraturan yang mereka gunakan, bukan dari hasil kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap pemangku kepentingan sudah memiliki pembagian tugas masing-masing. Namun pembagian tugas yang ada tersebut bukan merupakan pembagian tugas yang berdasarkan oleh kesepakatan dari pemangku kepentingan itu sendiri, akan tetapi pembagian tugas yang ditetapkan secara mandiri oleh masing-masing aktor yang terlibat. Hal ini tentunya tidak sesuai pendapat Mills & Koliba (2015) yang menyatakan bahwa basis administratif akuntabilitas jaringan pemerintahan berfokus pada prosedur dan praktik yang diatur dalam pengelolaan jaringan pemerintah secara formal.

6. Berbagi Informasi

Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak tentu memerlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang bekerjasama. Keterbukaan informasi diperlukan agar pihak yang terlibat mengetahui informasi terbaru yang dan harus diketahui dalam menjalankan pekerjaannya. Dimana berbagi informasi bisa diartikan dengan adanya keterbukaan dalam mengakses data yang telah diolah sehingga dapat diterima dengan mudah oleh semua pihak yang sedang bekerja. Dalam kolaborasi yang dilakukan beberapa pihak, berbagi informasi penting dilakukan agar tidak adanya kerahasiaan antara pihak tertentu (Fahrudin, Purnama & Riasti, 2011).

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwasanya proses berbagi informasi antar para pemangku kepentingan dibangun dengan alur koordinasi yang cukup baik. Namun alur koordinasi yang baik itu hanya dibangun oleh instansi yang terdiri dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat, sementara itu untuk pemangku kepentingan di luar instansi pemerintah, koordinasi yang diciptakan belum cukup efektif, sehingga informasi yang terima begitu minim baik untuk swasta maupun masyarakat. Dengan demikian, maka kemudahan informasi dapat dikatakan belum diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Padahal menurut Sudarmo (2011) berbagi informasi harusnya difokuskan pada kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan serta adanya perlindungan *privacy* bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu perlu sistem informasi yang baik untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi, agar setiap pemangku kepentingan yang terlibat mendapatkan informasi yang sama dan dapat melakukan pengembangan di bidang pariwisata yang baik.

7. Akses terhadap Sumberdaya

Dalam menjalankan kolaborasi perlu adanya sumber daya yang memenuhi agar kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nawawi (2007) mengatakan bahwa akses yang berupa aset yang memiliki fungsi sebagai modal dan obyek pendamping dalam sebuah pekerjaan agar dapat menjalankan

tujuannya. Sumber daya dapat berupa manusia, teknis, keuangan, infrastruktur. Dalam kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat sumber daya yang harus terpenuhi adalah infrastruktur dan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian dalam mengembangkan Kawasan Senggigi nyatanya tidak diikuti dengan pengembangan infrastruktur. Dimana dalam pengembangan infrastruktur masih sangat terbatas, misalnya tidak tersedianya jalur untuk pejalan kaki, lampu penerangan yang tidak ada, hingga permasalahan sampah yang tak kunjung usai. Sementara, dari sisi pengembangan SDM, pada dasarnya telah dilakukan dengan memberikan pelatihan mengenai sadarwisata dan pemandu wisata, dengan adanya pelatihan dan pembinaan tersebut pengelola dapat mengembangkan fasilitas wisata seperti outbond, camping ground dan kerajinan, souvenir yang difasilitasi oleh pemandu.

Pemaparan hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan Kawasan Senggigi ini bukan hanya pengembangan obyek wisatanya saja namun sumber dayanya juga dikembangkan. Sumber daya yang harus dikembangkan adalah infrastruktur dan sumber daya manusia dilakukan agar pengembangan Kawasan Senggigi dapat dilakukan secara maksimal karena fasilitas yang ada juga terpenuhi serta sumber daya manusia yang terlibat sudah berkualitas serta dapat memudahkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Struktur jaringan yang dibangun antar aktor yang berkolaborasi menunjukkan struktur yang lemah. Hal ini ditandai dengan struktur jaringan dari aktor pemerintah belum sepenuhnya melibatkan aktor-aktor atau instansi lain yang memang seharusnya dilibatkan, misalnya: Dinas Ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas SDM, dan Dinas Perindustrian UMKM yang dapat berperan dalam memberikan pendampingan mengenai pendapatan ekonomi kreatif lokal dan pembentukan sikap masyarakat. Disamping itu, kelemahan ini juga terlihat dari struktur jaringan yang dibangun antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dimana keikutsertaan mereka (swasta dan pemerintah) dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi hanya bersifat sukarela, dan keterlibatannya pun masih dalam bentuk keterlibatan tidak langsung. Komitmen terhadap tujuan menunjukkan hasil yang belum baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya tujuan bersama dan misi umum yang diciptakan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan pariwisata Kawasan Senggigi. Tingkat kepercayaan yang dibangun antar aktor kolaborasi juga masih begitu lemah, dimana kepercayaan yang kuat hanya dibangun antar aktor kolaborasi antar instansi pemerintah, sedangkan kepercayaan kepada aktor di luar pemerintah (swasta dan masyarakat) masih begitu minim. Akses terhadap kekuasaan menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana Dinas Pariwisata selaku koordinator pengembangan pariwisata di Kawasan Senggigi sangat terbuka dan sangat mengetahui kinerja dari aktor kolaborasi lainnya. Dinas Pariwisata juga dapat memberikan tugas kepada pihak swasta dan masyarakat, sebab Dinas Pariwisata dianggap sebagai instansi yang paling memahami arah dan tujuan pengembangan Kawasan Senggigi. Pembagian akuntabilitas menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana setiap aktor kolaborasi sudah memiliki tugas masing-masing, meskipun

tugas tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan secara mandiri dari masing-masing aktor, dan bukan atas dasar kesepakatan bersama yang kemudian diformalkan. Berbagi informasi antar aktor kolaborasi juga belum menunjukkan hasil yang optimal, dimana informasi tersebut lebih banyak dibagikan hanya kepada mereka yang tergabung dalam instansi pemerintah, sementara informasi kepada pihak swasta dan masyarakat masih begitu minim. Akses terhadap sumberdaya menunjukkan hasil yang juga belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang masih belum memadai, meskipun pembangunan kualitas SDM dapat dikatakan sudah berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan. *Conference on Public Administration and Society, 01*, 92–118.
- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). *Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa. 04(02)*, 112–127. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>
- Deseve G, E. (2009). *Integration And Innovation*. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Deseve%2C+G%2C+E.+%282009%29.+Integration+And+Innovation"+In+&btnG="](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Deseve%2C+G%2C+E.+%282009%29.+Integration+And+Innovation)
- Dewi, R. T. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo)*. 1–123.
- Faidati, N., & Muthmainah, N. F. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–6.
- Fukuyama, F. (2003). *Francis Fukuyama What Is Governance? Center for Global Development 1800 Massachusetts Ave.* [www.cgdev.org](http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426906)
<http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426906>
www.cgdev.org
- Hariady, L. L. A. (2018). *Implementasi Pengembangan Kawasan Pariwisata yang Berbasis Potensi Alam dan Budaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11*. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/7435>
- Hermansyah, Haris, A., & Amirudin. (2020). Model Kolaborasi dalam Pengembangan Parawisata di Kabupaten Sinjai. *Al Qisthi, 10(2)*, 133–145. <https://doi.org/10.47030/AQ.V10I2.86>
- Mills, R. W., & Koliba, C. J. (2015). The challenge of accountability in complex regulatory networks: The case of the Deepwater Horizon oil spill. *Regulation & Governance, 9(1)*, 77–91. <https://doi.org/10.1111/REGO.12062>
- Mitra Indonesia. (2020). *Menyongsong Kebangkitan Bisnis Pariwisata Yogyakarta Pasca Pandemi - Website LLDIKTI Wilayah V*. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/menyongsong-kebangkitan-bisnis-pariwisata-yogyakarta-pasca-pandemi>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. <http://library.stik-ptik.ac.id>
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2018). *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning*.



- <https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001700>, 18(3), 565–583.
<https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001700>
- Murphy, M., Arenas, D., & Batista, J. M. (2014). Value Creation in Cross-Sector Collaborations: The Roles of Experience and Alignment. *Journal of Business Ethics* 2014 130:1, 130(1), 145–162.
<https://doi.org/10.1007/S10551-014-2204-X>
- Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public Participation and Collaborative Governance. *Journal of Social Policy*, 33(2), 203–223.
<https://doi.org/10.1017/S0047279403007499>
- NTB, D. P. P. (2021). *Angka Kunjungan Wisatawan Triwulan IV 2021 – Dinas Pariwisata Provinsi NTB*. <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/angka-kunjungan-wisatawan-ke-ntb/angka-kunjungan-wisatawan-tahun-2013-2015/angka-kunjungan-wisatawan-2021/angka-kunjungan-wisatawan-triwulan-iv-2021/>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*.
- Salwa, F. (2021). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Sumatera Utara*.
- Sastrayuda, Gumelar S. (2010). *Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure*. Diakses Melalui <Http://File.Upi.Edu/Direktori/Fpips.Pdf>.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryahudaya. (n.d.). *Transparansi, Kolaborasi, Dan Resiliensi Kota Di...* - Google Scholar. Diambil 14 November 2022, dari https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Transparansi%2C+Kolaborasi%2C+Dan+Resiliensi+Kota+Di+Tengah+Pandemi+Covid-19.+Csis+Commentaries+Indonesia+Dmru-004.&btnG=
- Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglingsgo). *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 190-199.
- Suwandiman. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia* - *Kompasiana.com*.
<https://www.kompasiana.com/rausyanfikri0311/62aaed0edb24b12b7418cf3/dampak-covid-19-terhadap-sektor-pariwisata-di-indonesia>
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syahputra, K. A., & Ma'ruf, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, Dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar). *Publika*, 8(4), 1–10. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/35713>
- Thomson, A. M., James L. P., & Theodore, K. M. (2007). Conceptualizing And Measuring Collaboration. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 1(1), 23-56.
- Thomson, A.M & Perry, J.L. (2006). Collaboration Processes: Inside The Black Box. *Public Administration Review*, 66(1), 20-32.



- Tongkotow, N. F., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 281-298.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1-23.

